

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurahman, Soejono, H., 2003, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kedua, Rineka Cipta, Jakarta.
- Adiwinata, Saleh, 1980, *Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung.
- Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Mandar maju, Bandung.
- _____, 2009, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Al-Rashid, Harun, 1986, *Sekilas Tentang Jual-Beli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturannya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Amiruddin dan Zinal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt. Raja Grafindo, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Boediarto, M. Ali, 2005, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Swa Justicia, Jakarta.
- Effendi, Bachtiar, 1993, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadi, Sutrisno, 1998, *Metode Penelitian Skripsi Tesis dan Karya Ilmiah Lainnya*, Liberty, Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perjanjian Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Hadjon, Phillipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Cetakan Kesebelas, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksaaannya*, Cetakan Kesebelas, Djambatan, Jakarta.
- Hartanto, Andy, 2015, *Panduan Lengkap Hukum Praktis : Kepemilikan Tanah*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Kansil, C.S.T, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartasapoetra, G., 1992, *Masalah Pertanahan Indonesia*, PT Bineka Cipta, Jakarta.
- Kie, Tan Thong, 2000, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris Mengenal Profesi Notaris, Memahami Ptaktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Lubis, Suhrawardi, K., 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mustofa, 2017, *Tuntunan Pembuatan Akta-akta PPAT*, Karya Media, Yogyakarta.
- Nasution, S., 2002, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, PT Tarsito, Bandung.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Parlindungan, A.P., 1999, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, CV.Mandar Maju Bandung.
- Perangin, Effendi, 1997, *Hukum Waris*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

_____, 2013, *Hukum Agraria*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.

Sitorus, Oloan dan Darwinsyah Minin, 2003, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis, Disertasi)*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.

Soedjendro, J. Kartini, 2005, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Yogyakarta.

Soerojo, Herlien, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti, R., 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 1996, *Kebijakan pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas.

_____, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tobing, G.H.S., Lumban, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan ketiga, Erlangga, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.

Peraturan Menteri Negara Agraria No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah.

Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 25/SKB/V/2017 No 590-3167A Tahun 2017 No 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

C. Tesis, Makalah dan Jurnal

Erna Fahriati, "Kewenangan membuat Akta Pertanahan Antara Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Singkawang", *Tesis*

Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.

Herman Sidik, “Peran Kepala Desa Dalam Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertipikat Di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur”, *Tesis* Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007.

Konsorsium Pembaharuan Agraria, “Dari Aceh Sampai Papua : Urgensi Penyelesaian Konflik Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan”, *Catatan Akhir Tahun 2019*, Konsorsium Pembaharuan Agraria, Jakarta, 2020.

Brotsolarno Soelarnan, *Aspek Teknis dan Yuridis Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*, Makalah seminar Nasional Kebijakan Baru Pendaftaran Tanah dan Pajak-Pajak yang Terkait, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta, Yogyakarta 1997.

Yuwono, “Tanah Terlantar Menyalahi Fungsi Sosial”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITS, Volume 2, Nomor 1, Juni, 2009.

D. Internet

Badan Pertanahan Nasional, “Daftar PPAT”, <https://www.atrbpn.go.id/>, diakses pada tanggal 4 Maret 2020.

Bima Yogie Purnama, “Apakah atas tanah garapan bisa diterbitkan SHM ?”, <https://www.hukumonline.com> diakses pda tanggal 30 September 2020.

Fikri Salim Daeng Laja, “Hak Atas Tanah Menurut UUPA”, <https://realmaczman.wordpress.com>, diakses pada tanggal 2 Januari 2020.

Kementerian ATR, Peta Online, <https://bhumi.atrbpn.go.id/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2020.

Majelis Pengawas Daerah Palembang, “Daftar Notaris di Kota Palembang”, <https://www.mpdplg.com>, diakses pada tanggal 4 Maret 2020.

Pemerintah Kota Palembang, “Geografis Kota Palembang”, <https://www.palembang.go.id>, diakses pada tanggal 29 April 2020.

Sahid Raharjo, “Wawancara sebagai Metode Pengumpulan Data”,
<https://www.konsistensi.com>, diakses melalui Internet pada tanggal 26
April 2020.

Siti Yuliandari Lalisu, “Teori Hukum Lawrance Meir Friedman”,
<https://rechtslaw.blogspot.com>, diakses pada tanggal 25 September
2020.